

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP

Dalam bab III ini, penulis akan fokus menjelaskan mengenai bagaimana dinamika politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan presiden Donald Trump, yang dilihat dari kebijakan prioritas yang dibuat. Terdapat tiga fokus kebijakan yang akan penulis kembangkan, yaitu dalam bidang ekonomi, politik, dan juga keamanan. Dinamika politik luar negeri ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor yang berperan penting dalam setiap kebijakan yang dibuat dalam politik luar negeri Donald Trump. Terdapat aktor negara dan aktor non negara yang berperan dominan terhadap suatu politik luar negeri Amerika Serikat.

Dalam setiap isu yang sedang dihadapi Amerika, aktor-aktor yang berperan didalamnya tentu saja berbeda-beda. Pada isu-isu politik aktor negara sangat berperan penting dalam setiap kebijakan luar negeri yang dibuat, sedangkan untuk isu ekonomi terdapat aktor non negara yang ikut berperan didalamnya. Untuk melihat bagaimana hubungan antara isu dan peran aktor dalam politik luar negeri Donald Trump, dapat kita lihat berikut ini.

A. Kebijakan Ekonomi Donald Trump

Dalam suatu negara kebijakan ekonomi sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara itu berjalan. Amerika Serikat sendiri adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2013 hingga 2015. Donald Trump adalah presiden Amerika Serikat ke-45 yang merupakan salah seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat. Oleh karena itu setiap kebijakan yang Trump buat terlihat rasional dan memihak pengusaha. Hal ini dikarenakan ia mengetahui betul bagaimana berada diposisi para pengusaha. Pada masa kampanye 2016 lalu, rencana ekonomi Trump berfokus pada "*Make America Great Again*" (BBC, 2017).

Dia menegosiasikan kesepakatan terbesar Amerika Serikat dengan para pemilih yang merasa telah kehilangan Impian Amerika . Kebijakan Trump mengikuti nasionalisme ekonomi.

Isu politik luar negeri dalam hal ekonomi yang paling hangat di perbincangkan oleh masyarakat saat itu ialah isu perdagangan. Donald Trump ingin memikirkan kembali penawaran dagang agar lebih menguntungkan Amerika Serikat. Trump menyarankan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan menggunakan negosiator yang tujuannya untuk membuat Amerika menang dalam negosiasi tersebut. Trump berjanji untuk menjauh dari kesepakatan seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko jika negosiasi ulang yang baik dan sesuai keinginan Trump tidak dapat dicapai (BBC, 2017).

Trump juga membuat Rencana Energi *America First*. Trump akan menindak serta menegosiasikan ulang setiap perjanjian internasional yang dirasa telah membuat Amerika Serikat defisit perdagangan. TPP (*Trans Pacific Partnership*) dan kesepakatan Paris adalah beberapa kesepakatan yang ingin Trump hentikan. Berikut beberapa langkah pemerintahan Donald Trump dalam mewujudkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam bidang ekonomi yaitu Pada 23 Januari 2017 seminggu setelah dilantik, Trump menandatangani perintah untuk menarik diri dari negosiasi lebih lanjut tentang Kemitraan Trans-Pasifik. Dia berjanji akan menggantinya dengan serangkaian perjanjian bilateral. Kemudian Pada 16 Agustus 2017, pemerintahan Trump mulai menegosiasikan kembali NAFTA dengan Kanada dan Meksiko. Presiden Trump menepati janjinya untuk menegosiasikan ulang NAFTA sehingga semua pekerja Amerika Serikat dapat manfaat (Amadeo, 2019).

Donald Trump mengatakan akhirnya Amerika telah mampu untuk menegosiasikan ulang perjanjian yang sudah berpuluh-puluh tahun membuat kemakmuran Amerika Serikat terpuruk, dan mengirim kekayaan Amerika Serikat keluar dan dinikmati oleh negara lain. Kemudian langkah selanjutnya Trump mengumumkan penarikan AS dari Paris Climate Agreement Pada tanggal 1 Juni 2017. Trump mengatakan dia ingin menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik, tetapi para pemimpin dari Jerman, Prancis, dan Italia mengatakan perjanjian itu tidak dapat dinegosiasikan kembali. Trump juga berjanji

untuk menghilangkan Rencana Aksi Iklim dan Perairan pemerintahan AS. Dia berjanji untuk memungkinkan lebih banyak pengeboran di tanah federal minyak serpih dan gas alam (Amadeo, 2019).

Dalam hal tarif perdagangan pemerintahan Trump mencapai kesepakatan kerjasama dengan *European Commission* untuk menghapus tarif, meningkatkan ekspor energy, mengurangi hambatan non tarif, dan menangani perdagangan yang tidak adil. Hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Trump untuk melindungi para pekerja Amerika Serikat dari ancaman upah rendah dan perlakuan semena-mena. Kemudian Trump juga memberlakukan tarif dan kuota pada panel surya dan mesin cuci impor. Pada 1 Maret 2018, ia mengumumkan tarif 25 persen untuk impor baja dan 10 persen untuk aluminium. Trump telah menyerukan tarif 35% untuk impor Meksiko dan tarif 45% untuk produk-produk dari China (BBC News, 2016).

Hal ini Trump lakukan untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestic dari ancaman produk luar dan juga mendorong warga Amerika Serikat untuk membeli lebih banyak produk yang dibuat di Amerika Serikat. Seperti strategi dalam politik luar negerinya yaitu "*America First*". Strategi ini mengutamakan kepentingan Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum kepentingan negara lain. Trump ingin mengembalikan kejayaan ekonomi Amerika Serikat dengan mengembalikan orang-orang dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Agar kembali mendirikan kantor pusat di Amerika Serikat. Cara yang digunakan Trump agar mereka kembali ke Amerika Serikat yaitu melakukan pemotongan pajak untuk semua orang dan dalam hal pajak federal Trump akan mengurangnya menjadi 15% dari yang sebelumnya yaitu 35%. Hal ini bertujuan agar supaya para pengusaha mau membuka produksinya di negaranya sendiri (BBC News, 2016).

Politik luar negeri pemerintahan Donald Trump lebih berfokus pada kepentingan Trump untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Trump melihat banyaknya ancaman-ancaman yang dihadapi para pekerja maupun perusahaan di dalam negeri sehingga ia melakukan proteksi terhadap pekerja dan perusahaan Amerika Serikat dari dunia

luar. Dalam politik luar negeri di bidang ekonomi aktor negara tidak dapat memainkan peran secara keseluruhan dalam penentuan pembuatan kebijakan luar negeri. Adanya aktor non negara yang dapat ikut berperan dalam pengambilan keputusan luar negeri di Amerika Serikat. Aktor non negara ini lebih terfokuskan pada para pengusaha maupun individu yang memberikan dukungan maupun tuntutan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

B. Kondisi Politik Luar Negeri Era Donald Trump

Trump adalah seorang realist yang mana baginya kepentingan nasional adalah penentu utama politik luar negeri. Politik sendiri menurut KBBI adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sehingga Politik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional(Cipto, 2018).

Politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang politik merupakan cara Amerika Serikat untuk mempertahankan citra dan eksistensinya di dunia internasional. Hal ini guna memperkuat peran Amerika Serikat di politik global. Berikut merupakan bentuk-bentuk politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang politik yaitu melakukan diplomasi, memberikan bantuan luar negeri, mengunjungi negara lain, bergabung dengan forum-forum masyarakat internasional dengan cara bergabung dengan organisasi-organisasi internasional, dan cara lainnya yang berfungsi untuk mempengaruhi negara lain agar sesuai dengan kepentingan dari Amerika Serikat sendiri.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, politik luar negeri Amerika Serikat menerapkan strategi *America First* yaitu menekankan kepentingan utama Amerika Serikat menjadi pertimbangan dalam berhubungan dengan negara manapun baik sesama negara Barat maupun negara berkembang. Bagi seorang realist seperti Trump keamanan nasional sebuah negara akan sangat tergantung pada kekuatan ekonomi dan militernya. Oleh sebab itu Trump banyak melakukan pertemuan sebagai cara agar terciptanya perundingan dengan negara-negara lain. Perundingan

ini dilakukan agar Trump dapat mencapai kesepakatan yang ingin dicapainya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan menguntungkan untuk negaranya(The White House, 2018).

Donald Trump tidak ingin melakukan kerjasama dengan negara ataupun organisasi yang sekiranya dapat merugikan Amerika Serikat. Seperti pada pertemuan KTT G7 di Kanada pada tanggal 8-9 Juni 2018 di KTT G7 Trump membahas mengenai perdagangan bebas yang Trump rasa tidak adil, kemudian membahas mengenai migrasi yang tidak terkendali dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, serta mengenai perjanjian nuklir dengan Iran yang dirasa Trump adalah perjanjian terburuk. Dengan menghadiri KTT G7 ini Trump mencoba untuk menyebarkan pengaruhnya di dunia Internasional dan berusaha mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu *Make America Great Again*(The White House, 2018).

Donald Trump tidak hanya melakukan politik luar negeri dengan menghadiri pertemuan internasional saja. Namun ia juga melakukannya dengan langsung dengan melakukan pertemuan dengan negara yang berhubungan dengan kepentingan Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah pertemuan Donald Trump dengan presiden Korea Utara Kim Jong Un di Singapura yang bertujuan untuk membahas mengenai senjata nuklir Korea Utara. Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang berhasil berunding dengan pemimpin Korea Utara(United States Department of State, n.d.).

Kemudian bentuk politik luar negeri Trump selanjutnya ialah dengan kunjungan ke negara-negara sekutunya seperti Arab Saudi dan Israel guna mencapai kepentingan nasional yang ingin dicapainya yaitu keuntungan bagi Amerika Serikat. Seperti yang dia janjikan selama kampanye 2016, Donald Trump telah mengambil pendekatan yang berbeda. Tentunya ada aspek kontinuitas. Presiden telah mendorong sekutu untuk menerima lebih banyak beban keamanan regional, menolak godaan untuk mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Suriah dan hotspot lainnya, dan seperti Obama mentolerir intervensi Arab Saudi di Yaman. Namun dalam hal-hal penting, ia telah menyimpang dari kebijakan pendahulunya. Hubungan dengan Riyadh telah

meningkat secara signifikan, dibandingkan ketika kepresidenan Obama. Selama masa kepresidenan Obama, pemerintah Amerika Serikat dan Arab Saudi sering berselisih(Thompson, 2018).

Demikian pula, meningkatkan hubungan dengan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menderita selama masa pemerintahan Obama, telah kembali menjadi prioritas Amerika Serikat(Thompson, 2018). Bentuk politik luar negeri Presiden Donald Trump selain melakukan diplomasi di pertemuan serta kunjungan kerja. Trump juga menerapkan politik luar negeri cenderung doctrinal dan *hard power* seperti mengancam negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat serta membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang ia sampaikan melalui pers maupun akun Twitternya. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan politik luar negeri dengan negara lainnya. Politik luar negeri Trump juga banyak di kritik karena dianggap dapat menyebabkan munculnya musuh baru bagi Amerika Serikat(Cipto, 2018).

Gaya politik luar negeri Donald Trump pada dasarnya memiliki kemiripan dengan Obama. Kedua pemimpin ini pada dasarnya sama-sama seorang realist. Bagi Obama maupun Trump keamanan nasional sebuah negara akan sangat tergantung pada kekuatan ekonomi dan militernya. Dengan mengejar kekuatan ekonomi dan militer masing-masing akan membentuk perimbangan kekuatan. Trump terlihat lebih realist dibandingkan Obama karena meninggalkan TPP, kesepakatan paris dan kesepakatan lainnya yang mana Obama setuju. Perbedaan keduanya yaitu Obama lebih menggunakan pendekatan diplomatis sedangkan Trump cenderung transaksional(Cipto, 2018). Di dalam politik luar negeri bidang politik, aktor yang berperan penting dalam membuat keputusan adalah presiden dan kongres. Aktor lain seperti Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, CIA, dan lembaga lainnya hanya berperan sebagai aktor pendorong yaitu sebagai pemberi informasi untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden dan Kongres(Luthfi, 2018).

C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Isu Keamanan

Donald Trump berjanji akan mengutamakan keamanan, kepentingan, dan kesejahteraan warga negara Amerika Serikat. Ia berjanji akan merevitalisasi ekonomi, membangun kembali militer, mempertahankan perbatasan, dan melindungi kedaulatan Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump ingin membuat kebijakan luar negeri dalam hal keamanan yang bertujuan untuk menjaga negaranya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan dari luar. Yaitu dengan memerangi teroris di luar negeri dan memperkuat pertahanan perbatasan dan kontrol imigrasi. Pemerintahan Donald Trump berkomitmen untuk membangun kembali militer Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dengan kekuatan yang dimiliki, sebagai prioritas bangsa ini(The White House, n.d.).

Hal ini dilakukan Amerika Serikat karena adanya tragedi 11 September 2001 yang menewaskan ribuan orang warga Amerika Serikat. Tragedi ini telah merubah politik luar negeri Amerika Serikat menuju politik global. Peristiwa ini merupakan awal pergeseran politik luar negeri Amerika Serikat yang semula hanya berfokus pada geopolitik menjadi politik luar negeri yang berfokus pada tantangan global yaitu untuk memerangi terorisme tersebut(Cipto, 2018).Selama kampanye pemilu 2016, Trump berulang kali mendefinisikan kepentingan global Amerika Serikat yaitu hanya mengenai ekonomi, dengan peran negaranya sebagai penjaga perdamaian, penyedia pencegah nuklir terhadap negara seperti Korea Utara dan Iran, advokat hak asasi manusia dan sebagai penjamin perbatasan sekutu(Sanger & Haberman, 2016).

Trump juga berulang kali menyerukan kepada negara-negara sekutu, termasuk Jerman, Israel, Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan, untuk mengkompensasi Amerika Serikat karena telah membantu melindungi negara mereka, dan mengatakan bahwa kesediaannya untuk membela negara mereka tergantung pada seberapa besar negara itu bersedia membayar Amerika Serikat untuk menyelamatkan mereka(Hensch, 2016). Trump dan penasihatnya juga menekankan pandangan mereka bahwa

negara-negara lain perlu meningkatkan komitmen keuangan mereka untuk pertahanan mereka sendiri atau memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat untuk menyediakannya(Sharman, 2018).

Trump juga mengkampanyekan pertahanan nasional yang kuat selama pemilu 2016 dan dalam proposal anggaran pertamanya sebagai presiden pada Maret 2017, Trump mengusulkan peningkatan \$ 54 miliar (10%) peningkatan dalam pengeluaran pertahanan, hingga total \$ 639 miliar untuk tahun anggaran 2018. Dia mengatakan peningkatan itu akan diperlukan untuk memerangi terorisme, meningkatkan kesiapan pasukan, dan membangun kapal dan pesawat baru dan akan dibayar dengan pemotongan dalam ke lembaga-lembaga lain, termasuk pemotongan 28% dari anggaran Departemen Luar Negeri . Dia juga meminta tambahan \$ 30 miliar untuk Departemen Pertahanan selama sisa tahun anggaran 2017(Cohen, 2017).

Pemerintahan Donald Trump juga meningkatkan keamanan border dengan membangun dinding perbatasan, menggunakan pertahanan berlapis-lapis dan teknologi canggih, menggunakan personil tambahan, dan tindakan lainnya. Pemerintah Amerika Serikat akan bekerja dengan mitra asing untuk mencegah, mendeteksi, dan mencegah individu yang mencurigakan sebelum mereka memasuki Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat akan meningkatkan pemeriksaan calon imigran, pengungsi, dan pengunjung asing lainnya untuk mengidentifikasi individu yang mungkin berisiko terhadap keamanan nasional atau keselamatan publik. Pemerintahan Donald Trump akan menetapkan standar keamanan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa pemerintahan Donald Trump telah menjauhkan orang-orang berbahaya dari Amerika Serikat(The White House Washington, 2017).

Hal ini dikarena imigran ini biasanya melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Amerika Serikat. Pada awal tahun 2017, Presiden Donald Trump menandatangani perintah Eksekutif 13780, yang meminta Sekretaris Keamanan Dalam Negeri untuk mengembangkan *baseline* minimum baru untuk berbagi informasi dari negara-negara asing sebagai

pengegar mereka yang membawa ancaman masuk kedalam Amerika Serikat(The White House, 2017).

Presiden Trump menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional John S. McCain (*National Defense Authorization Act*) Tahun Anggaran 2019 untuk membangun kembali militer Amerika Serikat Memberikan otorisasi \$ 716 miliar untuk pertahanan nasional Amerika Serikat. Bersama para sekutu dan mitranya. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional John S. McCain memberikan otorisasi dana untuk operasi dan keterlibatan dalam kegiatan pertahanan dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat. NDAA tetap percaya dengan dukungan Presiden Trump terhadap Israel dan memberikan otorisasi \$ 500 juta untuk pengembangan bersama dan produksi bersama sistem pertahanan rudal. Dana yang disahkan oleh NDAA akan membantu Amerika Serikat dan mitranya melanjutkan perjuangan untuk menghancurkan ISIS, termasuk \$ 850 juta untuk melatih dan melengkapi Pasukan Keamanan Irak. NDAA akan memperkuat upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan pertahanan mitra-mitra Eropa, termasuk \$ 250 juta yang didedikasikan untuk bantuan keamanan untuk Ukraina(The White House, 2018a).

Pengambilan keputusan pertahanan dalam pemerintahan Donald Trump dapat diorganisir dan disederhanakan dengan mencapai konsensus internal tentang *Grand strategy* untuk mengamankan kepentingan Amerika di luar negeri. Yaitu dengan memutuskan ukuran dan komposisi angkatan bersenjata yang diperlukan untuk memenuhi kemungkinan militer yang rasional, dan dengan menciptakan anggaran pertahanan yang memadai untuk menanggung tantangan-tantangan itu. Thorn berry dan Krepinevich mengatakan adanya tiga ancaman untuk keamanan Amerika Serikat dan kepentingan vital Amerika Serikat diluar negeri yaitu meningkatnya kekuatan konvensional Tiongkok untuk mencari dominasi regional di Pasifik Barat, yang kedua yaitu penggunaan pasukan proksi Rusia untuk mendorong kembali kebebasan politik dan membuka pasar di negara-negara bekas Soviet di Eropa Timur, dan yang ketiga adalah potensi nuklir dan ekspansi ideologis kekuatan Iran di Timur Tengah. Negara-negara revisionis ini juga menantang Amerika Serikat

dan sekutu akses ke perdagangan global dan komunikasi global (Haffa, 2017).

Untuk menghadapi ancaman-ancaman Trump telah membuat sejumlah keputusan kebijakan luar negeri yang konsekuen di sepanjang masa kepresidenannya, yaitu termasuk penilaian kembali komitmen global Amerika Serikat yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti penarikan bertahap peran Amerika Serikat dalam Perang Sipil Suriah, Perjanjian INF, dan UNESCO. Dia telah mengusulkan perjanjian penggantian untuk NAFTA, larangan perjalanan dari negara-negara tertentu, mengupayakan hubungan bilateral langsung dengan Korea Utara, dan menarik kembali Amerika Serikat dari JCPOA serta meningkatkan sanksi terhadap Iran (Borger, 2019).

Pada proses pembuatan politik luar negeri dalam bidang keamanan aktor yang sangat berperan penting adalah aktor-aktor negara. Keputusan akhir ada pada Presiden namun ini juga sudah harus disetujui oleh Kongres. Peran Dewan Keamanan, Departemen Pertahanan, CIA, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Perdagangan ialah sebagai penyedia informasi yang sekiranya bisa dijadikan rujukan oleh Presiden dan Kongres dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri. Namun peran Departemen Pertahanan serta Dewan Keamanan sangatlah diperlukan. Agar terciptanya keamanan di dalam negeri Amerika Serikat maupun Sekutunya (Luthfi, 2018).

Dari penjelasan mengenai ketiga aspek politik luar negeri Amerika Serikat dapat dilihat bahwa ditarik bahwa politik luar negeri merupakan sistem kegiatan yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Dari penjelasan tiga aspek politik luar negeri diatas, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini tentunya dilandasi oleh perbedaan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika pada saat periode kepemimpinan tertentu. Serta peran-peran dari aktor negara maupun non negara dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri pemimpin yang sedang menjabat.